

USAHA PEMULANGAN TENTARA JEPANG DAN EVAKUASI APWI KE NEGARANYA TAHUN 1945-1947

Muhammad Aji Wira Wardhana, Maskun dan Syaiful

FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947, faximile (0721) 704 624

e-mail: aji7612@gmail.com

Hp. 085669945627

The purpose of this research was to find out what are the Indonesian Government's efforts in repatriation and evacuation of Allied Prisoners of Wars and Internees and Japanese Army in Indonesia in 1946-1947. The research method was the descriptive method. The data collection technique was literature study technique and documentation. The data analysis technique was the qualitative data analysis. Based on the results of the research, the work done in Indonesian Government's repatriation of Japanese Army and Evacuation Allied Prisoners of Wars and Internees (APWI), Repatriation of Japanese Army through two pathways, namely overland by train and truck, and sea lanes by using wooden boats and iron boats, Allied Prisoners of wars and internees (APWI) evacuation using three lines, overland by train and truck, the sea route using wooden boats and iron boats, and air lines using Dakota aircraft.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apa sajakah Usaha Pemerintah Indonesia dalam Pemulangan Tentara Jepang dan Evakuasi *Allied Prisoners of Wars and Internees (APWI)* di Indonesia tahun 1946-1947 . Penelitian ini menggunakan metode Historis dengan teknik penelitian studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, usaha yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pemulangan tentara Jepang dan Evakuasi *Allied Prisoners of Wars and Internees (APWI)* yaitu pemulangan tentara Jepang melalui dua Jalur, yaitu jalur darat dengan menggunakan kendaraan Kereta Api, dan Truk dan jalur laut dengan menggunakan kapal kayu dan kapal besi, Evakuasi *Allied Prisoners of Wars and Internees (APWI)* menggunakan tiga jalur, yaitu jalur darat dengan menggunakan kendaraan Kereta Api dan Truk, jalur laut menggunakan kapal kayu dan kapal besi dan jalur udara dengan menggunakan Pesawat tipe Dakota.

Kata kunci: apwi, tentara jepang, usaha

PENDAHULUAN

Setelah Kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Sekutu tanggal 6 Agustus 1945, keesokan harinya tanggal 9 Agustus 1945 bom atom kedua jatuh di Kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Keadaan ini merupakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Setelah kekalahan dan menyerahnya Jepang kepada Sekutu, Komando Sekutu Asia Tenggara di Singapura mengutus tujuh perwira Inggris di bawah pimpinan Mayor A.G. Greenhalgh untuk datang ke Indonesia. Mereka tiba di Indonesia pada 8 September 1945 dengan tugas mempelajari dan melaporkan keadaan di Indonesia menjelang pendaratan rombongan Sekutu.

Pada tanggal 16 September 1945 rombongan perwakilan Sekutu mendarat di Tanjung Priok Jakarta dengan menggunakan Kapal Cumberland. Rombongan ini dipimpin laksamana Muda W.R. Petterson. Dalam rombongan ini ikut pula C.H.O. Van Der Plas yang mewakili Dr. H.J. Van mook, Kepala *Netherlands Indies Civil Administrations* (NICA).

Tujuan awal kedatangan Sekutu adalah untuk memulangkan Tentara Sekutu yang ditawan oleh Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Keadaan para tawanan perang sangat buruk. Hal ini dikemukakan oleh M.C. Ricklefs bahwa :

Di beberapa daerah orang Indonesia menyerang serdadu-serdadu dan warga sipil Belanda, sehingga satu-satunya cara menyelamatkan diri ialah menyerah kepada pihak Jepang. Pihak Jepang berniat menawan semua orang Eropa (kecuali warga negara sekutu-sekutu Jepang, terutama orang-orang Jerman). Perkiraan-perkiraan tentang jumlah terakhir seluruh tawanan adalah sekitar 170.000 orang, 65.000 orang diantaranya adalah tentara Belanda, 25.000

orang adalah serdadu-serdadu Sekutu lainnya, dan 80.000 orang adalah warga sipil (termasuk 60.000 wanita dan anak-anak).

Kondisi di kamp-kamp tawanan sangat buruk. Kurang lebih 20 persen tawanan militer Belanda, 13 persen warga sipil wanita, dan 10 persen anak-anak meninggal dunia. Jumlah tertinggi korban yang meninggal dunia terdapat di kamp-kamp sipil pria, yaitu 40 persen meninggal dunia. (M.C. Ricklefs, 2011: 298)

Kedatangan Sekutu disambut dengan baik oleh pihak Indonesia, Namun hal ini tidak berlangsung lama setelah adanya pasukan Belanda yang ikut dalam rombongan pasukan Sekutu, Hal ini seperti diungkapkan Marwati Djoened Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto :

Akan tetapi, setelah diketahui bahwa dalam pasukan Sekutu itu terdapat serdadu Belanda dan aparat *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) yang terang-terangan bermaksud menegakkan kembali pemerintah Hindia Belanda, sikap pihak Indonesia berubah menjadi curiga, bahkan memperlihatkan sikap bermusuhan. Situasi keamanan dengan cepat memburuk sebab NICA mempersenjatai anggota KNIL yang baru dibebaskan dari tawanan Jepang (Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 2010: 186-187).

Di berbagai daerah, *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) yang tergabung dalam pasukan Sekutu melancarkan provokasi dan melakukan teror sehingga terjadi berbagai pertempuran di daerah-daerah seperti Surabaya, Medan, Ambarawa, Manado dan Bandung. Pertempuran Surabaya yang dilakukan oleh pejuang Indonesia telah berhasil mencegah kota Surabaya diduduki oleh Sekutu yang membuat Sekutu kehilangan banyak pasukan dan dihentikannya operasi pelucutan senjata Tentara Jepang dan evakuasi *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI), Sekutu akhirnya meminta

bantuan kepada Pihak Indonesia untuk memulangkan Tentara Jepang dan evakuasi *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI) .

Pada 9 Januari 1946 diadakan pembicaraan yang dipimpin Brigadir Jenderal Wingrove dari Markas Besar Sekutu dengan Mayor Jenderal Sudibyo yang mewakili Markas Besar Tentara Keamanan Rakyat. Tentara Sekutu meminta bantuan kepada Tentara Keamanan Rakyat untuk mengungsikan sejumlah *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI) yang masih berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur (M.Sabir, dikutip dari Buku Sejarah Diplomasi Indonesia dari masa ke masa, MT. Thoyeb,2004: 340).

Pertemuan awal antara pihak Sekutu dengan Pihak Indonesia ini menghasilkan perjanjian mengenai pemulangan Tentara Jepang dan *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI) antara Sekutu dengan Indonesia, yaitu:

APWI

1. Orang-orang Indonesia akan mulai mengevakuasi APWI semua dari lokasi mereka saat ini sekaligus.
2. Bahwa semua APWI akan dievakuasi ke Batavia
3. Bahwa Indonesia akan bertanggung jawab untuk memberikan mereka ke Sekutu di Batavia dalam keadaan baik, dan akan membuat semua pengaturan untuk keamanan, transportasi dan makan dalam perjalanan.
4. Bahwa Sekutu akan menjamin APWI tidak akan dipersenjatai setelah diserahkan.

Jepang

1. Bahwa Sekutu dan Indonesia akan mengevakuasi Jepang dari Jawa sesegera mungkin.
2. Semua senjata mereka dan peralatan akan dihancurkan di bawah pengawasan Sekutu di pedalaman Jawa, atau akan diserahkan kepada

Sekutu di pelabuhan atau pelabuhan yang ditunjuk. Bahwa dalam kasus yang terakhir Indonesia bisa mengirimkan wakilnya untuk melihat bahwa semua senjata dan amunisi dihancurkan oleh Sekutu dan tidak diserahkan kepada orang lain.

3. Bahwa penyerahan kontrol Semarang atau Surabaya tidak mungkin.
4. Dalam pandangan ayat (3) di atas bahwa jika orang Indonesia merasa terlalu sulit untuk menyerahkan Jepang di Semarang dan Surabaya, Sekutu akan menerima mereka di Batavia.
5. Bahwa perwakilan Indonesia akan mendiskusikan butir (3) dan (4) dengan Sekutu mereka dan kembali dengan kesepakatan lebih lanjut dengan Sekutu mereka dan kembali dengan kesepakatan lebih lanjut Januari 1946. (M.Sabir,dikutip dari Buku Sejarah Diplomasi Indonesia dari masa ke masa, MT. Thoyeb 2004: 379 – 380).

Dari perjanjian ini dihasilkan persetujuan bahwa Sekutu bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam pemulangan tentara Jepang dan Evakuasi *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI). Selanjutnya pemerintah Republik Indonesia menyerahkan pelaksanaan tugas itu kepada Tentara Republik Indonesia (TRI), dan mendirikan Panitia Oeroesan Pengangkoetan Djepang dan APWI (POPDA).

Tentara Republik Indonesia (TRI) telah diberi tugas dan tanggung jawab untuk mencari kamp-kamp yang belum mereka temukan lokasinya. Para komandan divisi Tentara Republik Indonesia (TRI) diinstruksikan agar sebelum 10 April 1946 sudah mendaftarkan lokasi yang jelas dengan mendata dan melaporkan berapa jumlah tawanan pria, wanita dan anak-anak yang sakit disertai rincian apakah sakit berat atau ringan. Tentara Indonesia juga membuat prioritas penjadwalan transportasi para

interniran yang dimulai dari Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah dan terakhir Jawa Barat (M.Sabir, dikutip dari Buku Sejarah Diplomasia Indonesia dari masa ke masa, MT. Thoyeb 2004: 337).

Pemerintah Indonesia mempunyai tugas dalam pemulangan Tentara Jepang dan Evakuasi *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI). Usaha ini akan dilakukan oleh Tentara Republik Indonesia (TRI) melalui sebuah organisasi yang dinamakan Panitia Oeroesan Pengangkoetan Djepang dan APWI (POPDA).

METODE PENELITIAN

Menurut Nugroho Notosusanto yang dimaksud dengan metode historis adalah: Sekumpulan prinsip atau aturan yang sistematis dimaksud untuk member secara efektif dalam mengumpulkan bahan-bahan sejarah. Menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dari pada hasil-hasilnya, biasanya dalam bentuk tertulis (Notosusanto, 1984:10).

Metode penelitian historis menurut Muhammad Nazir (1983:55) adalah penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan perkembangan serta pengalaman dimasa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut.

Dari pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan metode historis adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan suatu data atau bahan yang telah ditulis yang berisi tentang peristiwa atau kejadian di masa lalu, yang disusun melalui proses ilmiah secara kronologi, sistematis dan saling berkaitan.

Variabel penelitian adalah suatu gejala yang menjadi objek atau perhatian di dalam sebuah penelitian dan juga variabel penelitian sering dinyatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau

gejala-gejala yang akan diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal dengan fokus penelitian pada Usaha Pemerintah Indonesia dalam Pemulangan Tentara Jepang dan Evakuasi *Allied Prisoners Wars and Internees* (APWI).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka dan dokumentasi. Teknik kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber data yang diperlukan dari perpustakaan, yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti. Oleh karena dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari literature-literatur ilmiah maka kegiatan studi pustaka atau teknik kepustakaan ini menjadi sangat penting terutama dalam penelitian kualitatif (Nawawi, 1993:133).

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui sumber tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Hadari Nawawi, 1993:134). Dalam melakukan pengumpulan data tidak hanya menggunakan bahan-bahan berupa literatur atau buku-buku yang ada di perpustakaan tetapi juga peneliti harus mencari bukti-bukti atau sumber-sumber yang lain berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti atau arkeologi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah adalah teknik kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan bentuk penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dan sebagaimana adanya (Nawawi, 1993: 174). Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan

hasil dari pemikiran atau opini penulis terhadap segala sumber yang telah di dapat dan kemudian akan mempermudah peneliti untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Analisis data dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Dibawah ini merupakan tahap tahap dalam proses analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992:28) meliputi:

a. Reduksi Data

Yaitu sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan di lapangan. Reduksi data juga merupakan bentuk analisis data yang tajam, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data sampai akhirnya bisa menarik sebuah kesimpulan.

b. Penyajian Data

Yaitu data yang dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun, memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan sehingga menganalisis atau mengambil tindakan nantinya akan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

c. Verifikasi Data

Yaitu menarik sebuah kesimpulan secara utuh setelah semua makna-makna yang muncul dari data yang sudah diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kegunaan dan kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 8 September 1945 satu tim yang terdiri dari 7 orang militer dari tentara Inggris (tiga diantaranya adalah orang Belanda) yang dipimpin Mayor Greenhalgh, dengan wakilnya Letnan S.J.

Baron Van Tuyll Van Serooskerken (seorang Belanda) diterjunkan dengan payung di Lapangan Terbang Kemayoran. Pendaratan pertama Sekutu terjadi di Lapangan Udara Kemayoran pada 8 September 1945 melalui penerjunan udara. Tim gugus depan yang terdiri dari tujuh perwira Sekutu diberi tugas memantau dan memberikan laporan situasi sebelum Kapal HMS Cumberland merapat di Pelabuhan Tanjung Priok seminggu setelah laporan situasi dan kondisi masuk ke Markas Besar Sekutu (M.T.Thoyeb, 2004 : 309).

Tim itu resminya adalah dari RAPWI dan membawa tugas untuk menguruskan APWI yang banyak terdapat di Pulau Jawa. Sebenarnya tim ini ditugaskan untuk menyelidiki situasi di Pulau Jawa, dalam rangka mempersiapkan kedatangan tentara Sekutu di Indonesia.

Kedatangan tentara Inggris sebagai pasukan Sekutu di Indonesia pada akhir Perang Dunia II antara lain bertugas melaksanakan pengungsian APWI (*Allied Prisoners of Wars and Internees*). Badan yang melakukan tugas tersebut dinamakan RAPWI (*Recovery Allied Prisoners of Wars and Internees*).

Dengan jumlah yang begitu banyak, pihak Inggris mulai menduduki kota-kota yang dianggapnya penting untuk melaksanakan tugasnya membebaskan dan memulangkan para tawanan perang dan sipil, serta memulangkan tentara Jepang. Bogor diduduki pada tanggal 12 Oktober 1945, Bandung pada tanggal 13 Oktober 1945, Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 dan Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Pertempuran Surabaya dan kota-kota besar lainnya dimana pasukan Indonesia memberi perlawanan yang kuat memungkinkan dilangsungkan perundingan diplomatik antara Indonesia dan Sekutu.

Selama bulan September, Oktober, dan November 1945 telah terjadi pertempuran antara Sekutu dan Republik

Indonesia karena bangkitnya rasa kesadaran dan semangat kebangsaan untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia (M.T. Thoyeb, 2004 : 321). Pada tanggal 9 Januari 1946 di markas besar Sekutu di Jakarta diadakan perundingan antara tentara Sekutu dan tentara Republik yang masing-masing dipimpin oleh Brigadir Wingrove dan Mayor Jenderal Sudibyo.

Perundingan antara kedua belah pihak kemudian beralih ke masalah pengungsian tentara Jepang. Menurut pihak Sekutu tidaklah mungkin memberikan data mengenai jumlah tentara Jepang dengan tepat, akan tetapi diperkirakan kira-kira masih ada 30.000 tentara Jepang di Jawa Tengah dan 11.500 di Jawa Timur. Inggris merencanakan hendak menempatkan semua tentara Jepang di suatu lokasi di luar Pulau Jawa sebagai persiapan mengirim mereka kembali ke Jepang. Pihak Sekutu mempertanyakan bagaimana pihak Indonesia akan melaksanakan pengungsian dari pedalaman Jawa ke tiga pelabuhan yang dikuasai Sekutu yaitu Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Semua senjata Jepang akan dimusnahkan dan pihak Indonesia dapat mengirimkan wakilnya agar dapat menyaksikan bahwa senjata tersebut tidak jatuh ke tangan Belanda. Jawaban pihak Indonesia ialah bahwa di kota-kota Semarang dan Surabaya semua tentara Jepang harus dilucuti, penempatan TKR di keliling kota dan TKR akan masuk ke kota-kota tersebut untuk menjaga ketertiban hukum, kemudian TKR akan membawa tentara Jepang dari pedalaman dan menyerahkannya di pelabuhan kepada tentara Sekutu.

Persyaratan tersebut tidak dapat diterima oleh pihak Inggris karena berarti pengosongan tentara Sekutu dari Semarang dan Surabaya. Kalau pihak Indonesia tidak dapat menyalurkan tentara Jepang di kedua kota tersebut pihak Sekutu bersedia menerima mereka semua di Jakarta.

Selanjutnya, pada tanggal 17 Januari 1946 diadakan perundingan lebih lanjut di markas besar tentara Sekutu di Jakarta antara pimpinan dan staf tentara Inggris dan pimpinan beserta staf TKR.

Dalam rapat tersebut diambil keputusan bahwa pengungsian APWI akan dilaksanakan secepat mungkin. TKR akan memberitahukan 24 jam sebelumnya mengenai waktu dan tanggal kedatangan setiap kereta api yang mengangkut APWI. Ditetapkan bahwa TKR akan secepat mungkin memberitahukan jumlah seluruh APWI yang akan diungsikan dari pedalaman Pulau Jawa. Markas besar Sekutu juga akan mengirimkan informasi kepada TKR mengenai lokasi tempat APWI diperkirakan berada. Perwakilan TKR meminta suatu *signed agreement* kepada Sekutu yang berisikan jaminan bahwa APWI tidak dipersenjatai kembali dan digunakan untuk memerangi Indonesia.

Beberapa kesepakatan baru yang menyangkut tata cara pengangkutan tentara Jepang dan APWI dari daerah Republik Indonesia ke daerah yang dikuasai Sekutu, telah dapat dicapai. Disepakati, bahwa tempat penampungan APWI adalah di Jakarta, Semarang dan Surabaya, dan bahwa pengangkutan APWI sebagian besar akan dilakukan dengan menggunakan kereta api dan sebagian lagi dengan pesawat terbang atau kapal laut. Tempat Penampungan Tentara Jepang adalah di Pulau Galang, dan pengangkutan tentara Jepang akan dilakukan dengan kapal laut.

Menindaklanjuti perjanjian pada tanggal 17 Januari 1946 antara Pihak Sekutu dengan Pihak Indonesia, akhirnya dibentuk Panitia Oeroesan Pengangkoetan Djepang dan APWI (POPDA) yang lokasinya bertempat di Solo, tepatnya di Lapangan Terbang Panas, dengan nama POPDA I. Penentuan tempat ini sesuai dengan pilihan Sekutu. Kota Solo dipilih oleh AFNEI dan Markas Besar Tentara Republik Indonesia

sebagai pusat POPDA. Dari Kota ini, transportasi udara maupun kereta api diselenggarakan ke tempat transit guna pengangkutan selanjutnya dari Pulau Jawa ke Pulau Galang. Pos komando (posko) POPDA I juga membuka kamp yang dilengkapi dengan poliklinik dari Palang Merah Indonesia guna merawat bekas tawanan dan interniran yang sakit. Pada bulan Mei 1946 telah diangkut APWI dari Solo ke Semarang dengan pesawat terbang untuk selanjutnya diteruskan ke Pulau Galang. (M.T. Thoyeb, 2004 :348).

POPDA Pusat ini bertugas mengumpulkan data semua Tawanan Perang atau *Allied Prisoners of Wars and Internees (APWI)* serta menyelenggarakan transportasi udara maupun kereta api ke tempat transit untuk pengangkutan dari Pulau Jawa ke Pulau Galang.

POPDA ini merupakan badan terpadu yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah, yaitu TRI sebagai intinya, Kepolisian, Jawatan Kereta Api, Jawatan Kesehatan bersama Palang Merah Indonesia (PMI) (Saleh, 1987 : 20).

POPDA Pusat (POPDA I) harus mengumpulkan semua data dan menentukan jadwal transportasi ke daerah yang dikuasai Sekutu. Dalam melaksanakan operasinya, POPDA bekerja sama dan memberi wewenang (desentralisasi) kepada para komandan tentara setempat yang bertanggung jawab atas keperluan lokal daerah masing-masing. Komite Nasional Indonesia setempat juga turut mengatur urusan pengungsian itu dari daerah lokasi yang kecil-kecil, dan meneruskannya kepada tentara di Jawa Timur di mana seorang penghubung ditempatkan untuk mengatur jalannya operasi. Para Penghubung ini memantau terus gerakan transportasi dengan mencatat data yang mutakhir untuk dilaporkannya kepada POPDA Pusat di Solo. (M.T. Thoyeb, 2004 : 349)

Setelah dibentuknya POPDA I atau POPDA Pusat di daerah Solo, Selanjutnya POPDA II dibentuk di daerah Malang, Jawa Timur. POPDA II ini merupakan pusat pengumpulan *Allied Prisoners of Wars and Internees (APWI)* yang berada di Jawa Timur. POPDA II dibuka di Malang sebagai pusat pengumpulan APWI di Jawa Timur, yang sebagian diangkut ke Surabaya. Pada waktu itu terjadi gangguan terhadap kapal yang mengangkut APWI karena ditahan oleh kapal perang Belanda Evertsen sehingga menyebabkan hambatan. Pihak Republik Indonesia mengajukan protes mengenai kejadian tersebut. Karena itu, ditempuh kebijaksanaan selanjutnya bahwa transportasi bekas tawanan dan interniran itu diselenggarakan dengan kereta api untuk menghindari gangguan semacam itu (M.T. Thoyeb, 2004 : 349)

POPDA III dibuka di Tegal yang berfungsi untuk menampung APWI dari daerah pantai. Disamping itu, pihak Republik Indonesia juga bertugas mengangkut dan menyalurkan bekas tentara Jepang. Untuk itu telah dibuka kantor POPDA IV di Probolinggo khusus mengangkut bekas tentara Jepang dari seluruh Jawa. (M.T. Thoyeb, 2004 : 349)

Dalam rangka pengangkutan Interniran, motivasi POPDA tidak lain hanya memindahkan bekas tawanan dan interniran ke tempat-tempat terminal guna mempermudah RAPWI melanjutkannya dengan pesawat terbang, kapal laut atau kereta api. POPDA dalam hal ini hanya mengikuti petunjuk pihak Sekutu (RAPWI) di mana harus dibuka kamp-kamp transit. POPDA Pusat (POPDA I) didirikan di lapangan terbang Panasan, Solo.

Tempat transit lainnya terdapat di Cirebon, Tegal, Probolinggo dan Malang. Bantuan perlengkapan berupa truk untuk pengangkutan serta senjata untuk para pengawal, diterima oleh Markas Besar

Tentara. Sarana angkutan yang akan digunakan POPDA adalah :

Angkutan Darat :

- Kereta Api menjadi sarana angkutan darat yang utama, karena mudah disiapkan.
- Kebutuhan akan truck-truck dapat dipenuhi dari persediaan pada tentara Jepang, yang banyak mereka tinggalkan sewaktu mereka dipulangkan dan yang kemudian menjadi milik TRI.
- Pada TRI maupun instansi pemerintah lainnya tidak banyak tersedia kendaraan bermotor untuk dapat dikerahkan; demikian juga akan sulit apabila ingin merekuirasi kendaraan dari umum.

Angkutan Laut :

- Umumnya menggunakan kapal laut yang ada pada Angkatan Laut Jepang.
- Kapal-kapal laut yang digunakan untuk mengangkut tentara Jepang atau APWI untuk jarak pendek, umumnya terbuat dari kayu (hasil pembuatan galangan kapal di Pulau Jawa semasa pendudukan Jepang), yang beratnya rata-rata 300 ton dengan muatan sekitar 100 orang dan kecepatan berlayar hingga 5 knot.
- Untuk pengangkutan ke Pulau Galang digunakan kapal-kapal besi yang lebih besar dengan muatan lebih banyak dan dengan kecepatan hingga 9 knot.
- Awak kapal masih orang Jepang, tapi penanggung jawab angkutannya yang ditempatkan di setiap kapal adalah seorang perwira TRI.
- Kapal-kapal yang digunakan POPDA untuk pengangkutan tentara Jepang atau APWI, berlayar dengan bendera kebangsaan Indonesia, Merah-Putih.
- Pelabuhan-pelabuhan yang digunakan adalah Cirebon, Tegal, Pasuruan, dan Probolinggo, semua yang masih dalam daerah kekuasaan RI.

Angkutan Udara

- Digunakan pesawat-pesawat terbang tipe DC-3 (C-47 Dakota) yang diperbantukan dari RAF (Royal Air Force)
- Awak pesawat adalah orang Inggris, tapi penanggung-jawab angkutan dalam tiap pesawat adalah seorang perwira TRI.
- Lapangan terbang yang digunakan adalah Panasan/Solo, untuk pengangkutan ke Semarang dan Jakarta.
- Diduga bahwa lapangan terbang di Malang juga pernah digunakan untuk pengangkutan APWI ke Surabaya (Saleh, 1987 : 22).

Khusus untuk tempat transit Tentara Jepang, di buka POPDA IV di Probolinggo, dari sana seluruh Tentara di angkut ke Pulau Galang untuk selanjutnya di pulangkan ke negaranya.

Tahap awal yang dilakukan oleh Panitia Oeroesan Pengangkoetan Djepang dan APWI (POPDA) adalah mendata jumlah tawanan pria, wanita dan anak-anak, serta melaporkannya ke Markas Besar Sekutu.

Para komandan divisi Tentara Republik Indonesia diintruksikan agar sebelum 10 April 1946 sudah mendaftarkan lokasi yang jelas dengan mendata dan melaporkan berapa jumlah tawanan pria, wanita dan anak-anak yang sakit disertai rincian apakah sakit berat atau ringan (M.T. Thoyeb, 2004 : 336-337).

Mereka dikumpulkan dari pelbagai-bagai kamp interniran yang tersebar di Pulau Jawa dan diberangkatkan dengan kapal terbang dari Lapangan Terbang Panasan dekat kota Solo atau dengan kereta api dari Yogyakarta (Gadis Rasid, 1982 : 81).

Pengangkutan Tentara Jepang melalui jalur darat, kendaraan yang digunakan adalah truk dan kereta api. Koordinator dalam pemulangan Tentara Jepang yaitu Mayor S. Parman. Koordinator Angkutan Kereta Api adalah Letnan Soeparto.

Melalui Cirebon, diangkut sebanyak 2500 orang di pelabuhan untuk kemudian di bawa ke Pulau Galang, selanjutnya melalui Tegal diangkut sebanyak 10.000 orang kemudian di bawa ke Pulau Galang. Dan dari Pelabuhan Probolinggo sebanyak 22.400 orang yang terdiri dari *Iwabe Butai* (Unsur Angkatan Laut) dan *Sibatai Butai* (Unsur Angkatan Udara).

Dari Cirebon : 2500 orang, dari Tegal : 10.000 orang, dari Pelabuhan Probolinggo : 22.500 orang dari *Iwabe Butai* dan *Sibatai Butai* (unsur Angkatan Laut) serta unsur Angkatan Udara. Tentara Jepang diambil dari kurang lebih 20 lokasi dengan truck, kereta api dan kapal laut, Waktu angkutan sejak Januari 1946 hingga 18 Juni 1946 (Saleh, 1987 : 23).

Melalui jalur laut, pengangkutan tentara Jepang menggunakan kapal laut, untuk jarak pendek menggunakan kapal kayu, dan untuk pengangkutan ke Pulau Galang menggunakan kapal besi. Pelabuhan – pelabuhan yang digunakan yaitu Cirebon, Tegal, Pasuruan, dan Probolinggo.

Kapal – kapal di dapat dari Galangan Kapal di Pulau Jawa. Selama Pendudukan Jepang, di Pulau Jawa terdapat galangan kapal untuk membuat kapal-kapal dari kayu. Oleh Jepang kapal-kapal, yang berkapasitas rata-rata 300 ton dengan kecepatan rata-rata 5 knot, yang terbuat dari kayu itu digunakan untuk mengangkut orang maupun perbekalan antar pulau. Kemudian POPDA menggunakannya untuk mengangkut Pasukan Jepang maupun APWI.

Dari Pelabuhan Probolinggo : 22.500 orang dari *Iwabe Butai* dan *Sibatai Butai* (unsur Angkatan Laut) serta unsur Angkatan Udara. Tentara Jepang diambil dari kurang lebih 20 lokasi dengan truck, kereta api dan kapal laut, Waktu angkutan sejak Januari 1946 hingga 18 Juni 1946 (Saleh, 1987 : 23).

Operasi Panitia Oeroesan
Pengangkoetan Djepang dan APWI

(POPDA) dilakukan melalui tiga Jalur, yaitu jalur darat, jalur laut, dan jalur udara.

Karena operasinya akan meliputi operasi darat, laut dan udara, maka untuk pelaksanaan angkutan darat dipertanggung-jawabkan kepada TRI-Darat (umumnya dilaksanakan oleh unsur Polisi Tentara), untuk pelaksanaan angkutan laut diserahkan kepada TRI-Laut dan untuk pelaksanaan angkutan udara kepada TRI-Udara (Saleh, 1987 : 22).

Melalui Angkutan Darat, kendaraan yang digunakan dalam pemulangan Tentara Jepang dan *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI) adalah kereta api dan truk, angkutan laut menggunakan kapal kayu dan kapal besi, sedangkan melalui angkutan udara menggunakan Pesawat-pesawat terbang tipe DC-3 (C-47 Dakota).

Dalam evakuasi *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI), POPDA membuat 3 tempat Transit, yaitu POPDA I, POPDA II, dan POPDA III. POPDA I bermarkas di Solo, tugas dari POPDA I adalah mengumpulkan data *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI) dan menentukan jadwal transportasi ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Sekutu.

POPDA Pusat (POPDA I) harus mengumpulkan semua data dan menentukan jadwal transportasi ke daerah yang dikuasai Sekutu. Dalam melaksanakan operasinya, POPDA bekerja sama dan memberi wewenang (desentralisasi) kepada para komandan tentara setempat yang bertanggung jawab atas keperluan lokal daerah masing-masing. (M.T. Thoyeb, 2004 : 349).

Untuk POPDA II, terletak di Malang, khusus untuk pusat pengumpulan *Allied Prisoners Of Wars and Internees* (APWI) yang berada di wilayah Jawa Timur.

POPDA II dibuka di Malang sebagai pusat pengumpulan APWI di Jawa Timur, yang sebagian diangkut ke Surabaya. Pada waktu itu terjadi gangguan terhadap kapal

yang mengangkut APWI karena ditahan oleh kapal perang Belanda Evertsen sehingga menyebabkan hambatan. Pihak Republik Indonesia mengajukan protes mengenai kejadian tersebut. Karena itu, ditempuh kebijaksanaan selanjutnya bahwa transportasi bekas tawanan dan interniran itu diselenggarakan dengan kereta api untuk menghindari gangguan semacam itu (M.T. Thoyeb, 2004 : 349)

POPDA dalam hal ini hanya mengikuti petunjuk pihak Sekutu (RAPWI) di mana harus dibuka kamp-kamp transit. POPDA Pusat (POPDA I) didirikan di Lapangan Terbang Panasan, Solo. Tempat transit lainnya terdapat di Cirebon, Tegal, Probolinggo dan Malang. Bantuan perlengkapan berupa truk untuk pengangkutan serta senjata untuk para pengawal, diterima oleh Markas Besar Tentara.

POPDA III dibuka di Tegal yang berfungsi untuk menampung APWI dari daerah pantai. (M.T. Thoyeb, 2004 : 349)

Proses pengangkutan *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI) adalah dengan dipindahkannya *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI) menggunakan transportasi Kereta Api dan Pesawat Terbang, serta menggunakan Truk.

APWI diangkut dari daerah pedalaman ke pelabuhan-pelabuhan Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya dan Bondowoso dengan kereta api dan pesawat terbang. Untuk tugas ini, dibentuk badan khusus pada bulan April 1946 yang diberi nama POPDA (Panitia Urusan Pengangkutan Jepang dan APWI) yang berpusat di Solo, sebagai badan pelaksana yang bertanggung jawab kepada Pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Sosial (Aboe Bakar Lubis, 1992 : 139).

Tahap awal yang dilakukan oleh Panitia Oeroesan Pengangkoetan Djepang dan APWI (POPDA) adalah mendata jumlah tawanan pria, wanita dan anak-anak, serta

melaporkannya ke Markas Besar Sekutu. Para komandan divisi Tentara Republik Indonesia diinstruksikan agar sebelum 10 April 1946 sudah mendaftarkan lokasi yang jelas dengan mendata dan melaporkan berapa jumlah tawanan pria, wanita dan anak-anak yang sakit disertai rincian apakah sakit berat atau ringan (M.T. Thoyeb, 2004 : 336-337).

Mereka dikumpulkan dari pelbagai-bagai kamp interniran yang tersebar di Pulau Jawa. Setelah dikumpulkan, Untuk selanjutnya diberangkatkan dengan kapal terbang dari Lapangan Terbang Panasan dekat kota Solo atau dengan kereta api dari Yogyakarta (Gadis Rasid, 1982 : 81).

Evakuasi *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI) melalui jalur darat, kendaraan yang digunakan adalah Truk dan Kereta Api. Koordinator dalam evakuasi *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI) di Jawa Barat adalah Jenderal Mayor Didi Kartasasmita. Dibantu oleh Letnan Kolonel Rachmat Kartakoesoemah dan Kapten A. Satari. Diperbantukan pada pimpinan POPDA di Solo adalah Letnan Kolonel Hidajat Soekarmadidjaja. Koordinator Angkutan Kereta Api adalah Letnan Soeparto.

Setelah dilakukannya pendataan jumlah *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI) oleh POPDA, selanjutnya dilakukan penentuan jadwal transportasi. Selama bulan Desember 1945 hingga bulan Mei 1947 dilaksanakan pengangkutan APWI dengan Kereta Api dari Cirebon, Yogyakarta, Solo dan Malang menuju Jakarta. Pengangkutan ini dilakukan sebanyak 25 kali masing-masing sebanyak 500 orang per kereta api.

Pengangkutan dengan kereta api dari Cirebon, Yogyakarta, Solo dan Malang menuju Jakarta selama Desember 1945 hingga Mei 1947 sebanyak 25 kali @ 500 orang per kereta api. Setiap kereta api yang mengangkut APWI dikawal oleh pasukan

PT (Polisi Tentara) (Saleh, 1987 : 23). Pada tanggal 24 April 1946 rombongan APWI dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dibawa Mayor Mardjaman, memasuki kota Jakarta dengan Kereta Api yang dikawal oleh TRI (Saleh, 1987 : 23).

Selesainya pengangkutan *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI) menurut perjanjian antara Sekutu dengan Pemerintah Indonesia adalah tanggal 18 Oktober 1946. Pada tanggal 18 Oktober 1946 tibalah kereta APWI terakhir di Jakarta yang langsung dipimpin oleh Mayor Jenderal Aldulkadir. Maka dengan demikian selesailah pengangkutan APWI menurut persetujuan antara Republik dan Sekutu. Dengan selesainya masalah APWI, pada tanggal 30 November 1946 tentara Sekutu terakhir meninggalkan Jakarta dan AFNEI secara resmi dibubarkan. (Djenal Sidik Suraputra, 1991 : 49).

Sejak dimulai pengangkutan Jepang dan APWI, terangkut sejumlah 35.000 tentara Jepang dan 28.000 APWI. Dengan demikian Republik Indonesia yang baru berumur beberapa bulan, telah berhasil melaksanakan suatu tugas internasional, suatu tugas kemanusiaan yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekutu, tetapi yang tidak sanggup melaksanakannya, karena di Indonesia telah berdiri suatu Republik yang berkuasa di daerahnya, dengan aparatur yang tersusun, dengan semangat juang dan dedikasi yang tinggi. Berhasilnya operasi POPDA lebih memantapkan kedudukan Republik Indonesia di mata dunia. POPDA telah menunjukkan bahwa Republik Indonesia telah memiliki tentara yang berdisiplin dan berdedikasi tinggi, yang telah dapat menyelesaikan suatu tugas berat dan sulit dalam keadaan yang amat sangat sulit pula.

Pada dasarnya usaha Pemerintah Indonesia dalam pemulangan Tentara Jepang hanya sebatas mengumpulkan Tentara Jepang yang masih berada di daerah

Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tentara Jepang dikumpulkan di Pulau Galang, diangkut menggunakan kapal laut. Setelah itu barulah tugas Pasukan Sekutu untuk memulangkan Tentara Jepang ke negara asalnya.

Pemulangan tentara Jepang melalui 2 jalur angkutan, yaitu jalur darat dan jalur laut. Melalui jalur darat, sarana yang digunakan dalam pemulangan tentara Jepang adalah truk dan kereta api. Truk-truk diambil dari persediaan tentara Jepang. Melalui jalur laut, sarana yang digunakan berupa kapal laut. Menggunakan dua jenis kapal laut, yaitu kapal kayu dan kapal besi. Untuk jarak pendek menggunakan kapal kayu, namun untuk jarak panjang menggunakan kapal besi.

Evakuasi *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI) hanya sebatas mengumpulkan Tawanan Perang yang berada di Wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, dikumpulkan melalui tiga jalur, yaitu jalur darat, jalur laut dan jalur udara. *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI) kemudian dikumpulkan di beberapa tempat transit, yaitu di Semarang, Solo, Surabaya, dan Jakarta. Setelah dikumpulkan di tempat transit, barulah tugas pasukan sekutu untuk memulangkan *Allied Prisoners of Wars and Internees* (APWI) ke berbagai negara asalnya.

Dalam pengangkutan Jepang dan APWI, terangkut sejumlah 35.000 tentara Jepang dan 28.000 APWI dari seluruh daerah di Indonesia, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keberhasilan Indonesia dalam Pemulangan Tentara Jepang dan APWI membuat Republik Indonesia mulai diakui di mata Internasional. Republik Indonesia yang baru beberapa bulan berdiri telah berhasil mengangkut para bekas tawanan perang yang terletak di daerah-daerah di Indonesia.

Di karenakan kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil pada masa itu,

maka pemulangan Tentara Jepang dan Evakuasi *Allied Prisoners of Wars and Internees (APWI)* menggunakan kendaraan yang terbatas dan se adanya. Hal ini dibuktikan bahwa pengangkutan tentara Jepang dan APWI melalui jalur darat hanya menggunakan Truk-truk dan Kereta Api. Truk-truk itu sebagian adalah bantuan dari Pihak Inggris. Untuk pengangkutan melalui jalur laut, hanya menggunakan kapal yang berupa kapal kayu dan kapal besi. Kapal-kapal tersebut dirampas dari tangan Jepang dan digunakan untuk mengangkut Tentara Jepang dan APWI. Melalui jalur Udara, menggunakan Pesawat-pesawat terbang tipe DC-3 (C-47 Dakota), pesawat ini dipinjamkan oleh RAF (*Royal Air Force*) untuk Pemulangan Tentara Jepang dan Evakuasi APWI.

Dalam pengumpulan APWI, di buat tiga tempat transit, yang pertama POPDA I di Solo, untuk mengangkut seluruh APWI yang berada di Jawa Tengah untuk di bawa ke Jakarta, POPDA II di Malang untuk mengangkut seluruh APWI yang berada di Jawa Timur untuk di bawa ke Jakarta, dan selanjutnya POPDA III di Tegal untuk mengangkut Seluruh APWI yang berada di sekitar pinggiran pantai di Jawa Tengah.

Dengan demikian Republik Indonesia berhasil menyelesaikan tugas yang teramat berat, yang berhubungan dengan misi kemanusiaan dan tugas yang Pasukan Sekutu sendiri tidak sanggup untuk melaksanakannya, namun sanggup dilaksanakan oleh Republik Indonesia dengan hasil yang sangat baik yang mengangkat citra Republik Indonesia di mata Dunia Internasional, bahwa Republik Indonesia yang baru saja berdiri sanggup menjalankan tugas yang berat, yang tidak bisa dilakukan oleh Pasukan Sekutu.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan penulis dapat menyimpulkan bahwasannya Usaha

Pemerintah Indonesia dalam Pemulangan Tentara Jepang dan *Allied Prisoners of Wars and Internees (APWI)* di Indonesia tahun 1946-1947 yaitu :

Pemulangan Tentara Jepang oleh Pemerintah Indonesia menggunakan dua jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Jalur darat menggunakan transportasi berupa kereta api dan truk dan jalur laut menggunakan kapal kayu dan kapal besi. Tentara Jepang yang berada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah diangkut dengan truk, kemudian dikumpulkan di pelabuhan di Probolinggo untuk diangkut lagi menggunakan kapal besi dengan tujuan ke Pulau Galang. Untuk Pemulangan dari Pulau Galang ke Jepang adalah tugas Pasukan Sekutu. Pemerintah Indonesia berhasil mengumpulkan 35.000 tentara Jepang. Hal ini di dasarkan pada Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pasukan Sekutu.

Evakuasi *Allied Prisoners of Wars and Internees (APWI)* oleh Pemerintah Indonesia mengevakuasi para tawanan perang yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, melalui 3 jalur, yaitu jalur darat dengan menggunakan kendaraan kereta api dan truk, jalur laut dengan menggunakan kendaraan kapal kayu dan kapal besi, dan jalur udara menggunakan kendaraan pesawat terbang, dan dikumpulkan di tiga tempat transit, yaitu Solo, Surabaya, dan Jakarta. Setelah dikumpulkan di tempat transit, barulah tugas Pasukan Sekutu untuk memulangkan *Allied Prisoners of Wars and Internees (APWI)* ke negara asalnya. Dalam evakuasi *Allied Prisoners of Wars and Internees (APWI)* ,Pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi 28.000 *Allied Prisoners of Wars and Internees (APWI)*.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis A. Bakar. 1992. *Kilas Balik Revolusi : kenangan, pelaku, dan saksi*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- M.T. Thoyeb, dkk. 2004. *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta : PT Upakara Sentosa Sejahtera.
- Matthew B. Miles dan A.M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Gramedia.
- Nazir, Mohammad. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta : Indayu Press.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Inti Indayu: Jakarta
- Poesponegoro, Marwati Djoened. Notosusanto, Nugroho. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rasid, Gadis. 1982. *Maria Ulfah Subadio : Pembela Kaumnya*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Ricklefs, M.C. 2011. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Saleh, R.H.A. 1987. *Dari Jakarta kembali ke Jakarta*. 1987. Jakarta : Dinas Museum dan Sejarah Jakarta.
- Suraputra, Djenal Sidik. 1991. *Revolusi Indonesia dan Hukum Internasional*. Jakarta : Universitas Indonesia.